

**SOSIALISASI PROGRAM RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS RUSUNAWA REJOSARI)**

Oleh:

Umil Khairiah

Email : umilkhairiah17@gmail.com

Dosen Pembimbing : Mayarni, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761) 63277

ABSTRACT

The problem of housing and settlement is one of the problems that until now is still common in Indonesia, especially in large cities that have a large population and the limitations of residential land. One of the efforts to handle housing and settlement problems is to build a simple housing vertically or commonly called a rental apartment (rusunawa). However, the realization of the rusunawa program is not fully successful as expected because of the skills and skills in socialization as well as insufficient funding support to provide facilities for socialization. The purpose of this study is to identify, describe, and analyze the socialization of Rusunawa Program conducted by UPTD Rusunawa Pekanbaru by forming a technical team.

This research use grand theory of Harold D. Laswell (Effendy 2005:10) which is there are five indicators on it: 1) Who (who said), 2) Say What (what message to say), 3.) In Which Channel (the media), 4) The Whom (to whom is's addressed), 5) With What Effect (effect/impact).

After research, it's found that the socialization who is done by the technical team is considered still not optimal. Because after the socialization of many people who don't know about Rusunawa Program, the information is not up to that, affect the success of socialization of Rusunawa Program for low income communities in Kota Pekanbaru.

Keywords: *Socialization, Rusunawa, Program*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 h dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perumahan dan permukiman sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan dan permukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri.

Seiring dengan perkembangannya, kota-kota di Indonesia dalam usaha penyediaan rumah bagi warganya kerap dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Bertambahnya penduduk Kota disebabkan kelahiran maupun urbanisasi yang tidak diimbangi dengan daya tampung Kota. Sehingga menyebabkan ketidakteraturan pada tata ruang kota dan dapat menumbuhkan kawasan atau permukiman padat penduduk, kumuh, dan cenderung liar.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan Indonesia tumbuh dengan cepat. Hasil Sensus Penduduk tahun 1980 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan berjumlah 32,8 juta orang (22,3 persen dari jumlah seluruh penduduk). Pada tahun 1990, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 55,4

juta penduduk (30,9 persen dari total seluruh populasi) dan pada tahun 2000 menjadi 85,4 juta orang, yang mencakup 42,4 persen dari jumlah seluruh penduduk. Berdasar data hasil Sensus Penduduk tahun 2000, BPS memproyeksikan bahwa pada tahun 2010 lebih dari separuh penduduk Indonesia (54,2 persen) tinggal di perkotaan. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah tersebut diproyeksikan akan mencapai 68,3 persen.

Pesatnya perkembangan perkotaan akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan di kota. Masalah yang timbul kemudian berkembang kearah kebutuhan penduduk akan tempat tinggal atau perumahan. Karena dari tingkat pendapatan masing-masing penduduk yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan daya beli mereka terhadap suatu tempat tinggal (rumah). Bagi penduduk kota yang berpendapatan rendah, kebutuhan tempat tinggal ini merupakan masalah yang berat bagi mereka. Penyediaan perumahan salah satu hal yang harus di hadapi wilayah perkotaan dimasa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kota yang berlangsung cepat.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegritas. Permasalahan permukiman merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih sering terjadi di Indonesia, terutama pada kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang terbilang besar dan keterbatasan lahan hunian.

Kota Pekanbaru memiliki masalah pemukiman dan penataan ruang

perkotaan. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya jumlah penduduk di kota Pekanbaru terus bertambah, Sehingga membuat masyarakat atau para pendatang yang masih bertahan hidup di kota Pekanbaru namun tingkat kebutuhan ekonomi yang sangat terbatas menyebabkan mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni. Berdasarkan data statistik mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru sebesar 7,43% pertahun (BPS, Kota Pekanbaru) yang di dominasi oleh pendatang dan termasuk pertumbuhan tertinggi di Provinsi Riau.

Salah satu solusi penanganan masalah perumahan dan permukiman terutama di daerah padat penduduk adalah dengan membangun perumahan sederhana secara vertikal atau yang biasa kita sebut dengan rumah susun sewa (rusunawa). Pembangunan rumah hunian secara vertikal ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif rumah hunian untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin tinggi, dengan mengedepankan efisiensi lahan tanah di perkotaan yang semakin menipis.

Salah satu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang di bangun oleh pemerintah pusat di kota Pekanbaru yakni di kawasan Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari. Rusunawa ini memiliki 3 twin blok yang berlantai lima dengan tipe rumah 24 ukuran 4x6 dan memiliki 99 kamar disetiap twin bloknya. Pembangunan Rusunawa Rejosari merupakan program Rusunawa pertama kali di kota Pekanbaru. Pembangunan rusunawa Rejosari sudah dibangun sejak 2011, dan baru di fungsikan pada tahun 2016. Salah satu penyebabnya adalah dalam isi perjanjian pembangunan rusunawa tersebut dijelaskan bahwa apabila penyelenggara bangunan rusunawa selesai, maka bangunan tersebut akan di

serahkan ke pemerintah pusat bersamaan dengan anggaran dana yang sudah di sepakati, namun setelah pembangunan selesai pemerintah pusat belum bisa menempati draf kesepakatan tersebut sehingga pihak swasta belum bisa menyerahkan ke pemerintah pusat.

Program rumah susun sederhana sewa bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Sehingga di harapkan dengan adanya program ini dapat mengatasi masalah hunian liar yang kerap terjadi di perkotaan dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni.

Pemerintah kota Pekanbaru khususnya UPTD Rusunawa telah melakukan sosialisasi program rusunawa. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta ketua RT, RW, dan Lurah setempat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui media massa, brosur dan pemasangan spanduk di lokasi rusunawa.

Sosialisasi yang di lakukan ternyata masih belum cukup untuk mengetahui maksud dan tujuan program ini. Karna pembangunan rusunawa ini kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Terlihat dari kuota yang terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan Rusunawa ini pada tahun 2016, dari 297 unit hanya terhuni 5 unit saja. Informasi ini mengidentifikasi bahwa sosialisasi program rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat perlu dilakukan. Karna hal ini akan mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi masih kurang serta dana pendukung yang di miliki belum memadai untuk melakukan sosialisasi lebih menyeluruh lagi agar masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi rusunawa mengetahui program pemerintah ini, karna program rusunawa ini di tujuan bukan hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Tenayan Raya saja, melainkan untuk seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul penelitian yaitu: **“Sosialisasi Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pekanbaru”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang ditemukan dilapangan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sosialisasi program Rusunawa Rejosari Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Sosialisasi program Rusunawa Rejosari Kota Pekanbaru?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi program Rusunawa Rejosari Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Sosialisasi program Rusunawa Rejosari Kota Pekanbaru.

C. KONSEP TEORI

Menurut **Bridgman dan Glyn Davis dalam Nawawi (2009:8-9)** adalah banyaknya defenisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah defenisi kebijakan publik.

Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik, kita dapat meninjaunya dari 5 karakteristik kebijakan publik yaitu:

- a. Memiliki tujuan yang di desain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
- b. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya
- c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
- d. Pada hakikatnya adalah politis
- e. Bersifat dinamis.

Dikatakan juga oleh **Howlet dan M. Ramesh dalam Nawawi (2009:16)** bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
- c. Pembuat kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang

berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.

Menurut **Rozaqi (2009)** sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintegrasi dalam aktifitas pemberdayaan dan dilakukan terus menerus untuk memampukan masyarakat menanggulangi masalah-masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

Sosialisasi kebijakan merupakan langkah bijak untuk menginformasikan suatu program kepada masyarakat. Perumusan kebijakan dengan didasari ide-ide kreatif, inovatif, dan kemudian dilanjutkan dengan cara sosialisasi yang tepat itulah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari proses kebijakan. Informasi-informasi yang menyangkut suatu kebijakan terutama tentang konsep pelayanan sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi jika kebijakan tersebut bersifat baru.

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua tahap (**Sulistyawati, 2010:28**), yaitu:

- a. Sosialisasi primer, Peter L. Berger dan Luckmann mendefenisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu melalui dimana ia menjadi anggota masyarakat.
- b. Sosialisasi sekunder, didefenisikan sebagai proses berikutnya yang mengenalkan individu yang telah di sosialisasikan kedalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat.

Menurut **Harold D. Laswell dalam Effendy (2005:10)** komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Cara yang tepat untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *Who, Says What, In, Which Channel, To Whom, With What Effect?*

Paradigma Laswell diatas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu yakni komunikator atau pembicara, pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima, saluran atau media yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan, penerima atau komunikan sering juga disebut sasaran atau tujuan sebagai orang yang menerima pesan dari sumber, efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Program Rusunawa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa sosialisasi program rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan teori *Harold D. Laswell (2005:10)* dengan indikator yaitu:

1. *Who* (Siapa yang Menyampaikan)

Komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, agar pesan yang disampaikan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Oleh karena itu, komunikator harus terampil dalam berkomunikasi dan kaya akan ide serta penuh daya kreativitas. Terkait hal tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang mempunyai kecukupan baik kualitas dan kuantitas yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sebab tanpa kehandalan komunikator, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan seadanya. Selain itu, ketidakjelasan dari komunikator dapat mempengaruhi pengerian pesan awal.

Dalam proses sosialisasi ini yang menjadi komunikator adalah pihak UPTD Rusunawa Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengelola rusunawa.

Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh tim teknis tersebut adalah 3 kali dalam satu tahun. Sosialisasi dimulai dari awal tahun 2016 sejak penyerahan pengelolaan rusunawa dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru kepada UPTD Rusunawa.

Sosialisasi yang ideal adalah sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan intensif. Sehingga komunikasi yang tersebar di Kota Pekanbaru dapat mengerti pesan yang disampaikan dalam sosialisasi. Sosialisasi yang seperti ini harus dilakukan kepada komunikan agar kedepannya implementasinya dapat berjalan sesuai rencana.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim teknis juga belum dapat dikatakan optimal karena masyarakat sebagian sudah ada yang mengetahui dan sebagian belum mengetahui tentang sosialisasi yang dilakukan oleh tim teknis dari UPTD Rusunawa Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang dikatakan optimal itu jika pelaksana sosialisasi sudah menyampaikan pesan secara menyeluruh. Sosialisasi yang optimal dapat dicapai melalui penggunaan media-media yang tersedia di Kota Pekanbaru selain pertemuan yang dilakukan kepada sasaran tertentu seperti televisi, radio, koran, spanduk, dan lainnya. Sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat mengetahui dan memahami maksud diadakannya program pemerintah ini.

2. *Say What* (Pesan yang disampaikan)

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi.

Menurut **Edward**, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah

bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti, tentu saja komunikasi harus akurat dan harus di mengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan. Selain itu, komunikator juga harus memberikan informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan.

Pesan yang disampaikan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal diantaranya; penjelasan yang menyeluruh tentang tujuan kebijakan, keuntungan yang akan diterima dari kebijakan kepada kelompok sasaran, instansi pemerintah yang terkait, dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan dilapangan, karena Program Rusunawa masih tergolong baru dan masyarakat di Kota Pekanbaru masih banyak yang belum mengetahui maka UPTD Rusunawa perlu bekerja lebih keras lagi. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan saat pertemuan awal. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pendekatan dan cara yang berbeda, agar dapat menarik minat masyarakat berpenghasilan rendah Kota Pekanbaru untuk menempati rusunawa sehingga tujuan tersebut dibuat dapat tercapai.

Komunikator menyampaikan pesan sudah menyeluruh mengenai hal yang berhubungan dengan program Rusunawa yang ada seperti fasilitas apa yang diberikan di Rusunawa tersebut. Sebuah kebijakan atau program akan berjalan lancar jika mendapat

tanggapan atau respon positif dari kelompok sasaran.

Isi pesan yang di sampaikan didalam sosialisasi belum menyeluruh. Hanya beberapa bagian saja yang dapat di pahami oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Seharusnya semua hal yang disosialisasikan kepada masyarakat harus disampaikan dengan baik dan jelas, serta tepat sasaran sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memahami tentang program rusunawa.

3. *In Which Channel (Media yang digunakan)*

Media merupakan salah satu dari beberapa unsur Proses Komunikasi Sekunder yang mempunyai arti yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Media adalah alat komunikasi yang dipakai oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Tujuan dari penggunaan media adalah agar dapat menjangkau tempat atau lokasi yang jauh dn jumlahnya banyak.

Media yang sering digunakan dalam berkomunikasi adalah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Rusunawa Kota Pekanbaru kepada kelompok sasaran yaitu menggunakan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung melalui penyuluhan langsung dan sosialisasi tidak langsung melalui spanduk, membagikan brosur, dan media sosial.

Media yang digunakan selama proses sosialisasi yakni dengan sosialisasi langsung melalui

penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan brosur, spanduk dan media sosial. Jika dibandingkan dengan media-media yang terdapat di Kota Pekanbaru, sosialisasi Program Rusunawa belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan media yang digunakan masih kurang dan belum menjamin pesan atau informasi yang harus disampaikan dapat diterima, dan diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

Sebaiknya tim-tim teknis yang telah di bentuk dan diberi kepercayaan untuk mensosialisasikan Program Rusunawa ini dapat lebih banyak menggunakan media seperti televisi, pertemuan yang berkelanjutan dan lainnya agar informasi maupun pesan yang ingin di sosialisasikan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali sehingga program tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang terletak jauh dari pusat Kota Pekanbaru.

4. To Whom (Sasaran yang dituju)

Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur, salah satunya adalah Komunikan atau *Receiver*. Komunikan merupakan sasaran atau pihak-pihak yang wajib menerima sosialisasi dan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Dalam hal ini yang menjadi komunikan atau sasaran sosialisasi Program Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pekanbaru. Tepatnya penyampaian pesan kepada komunikan atau sasaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh komunikator agar pesan yang disampaikan dapat

diaplikasikan dengan baik dan benar dan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal itu dikarenakan pesan yang disampaikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Rusunawa. Antara komunikator dan komunikan harus terjalin kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik dapat terjadi jika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan jelas sehingga komunikan dapat memahami dengan baik. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan program dapat berjalan sesuai harapan.

Tim teknis sudah melakukan Sosialisasi Program Rusunawa tepat sasaran. Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada sasaran memang sudah tepat namun belum menyeluruh, sebab program ini banyak yang belum diketahui oleh semua sasaran. Hal ini didukung oleh hasil dilapangan.

Dari hasil penelitian tidak semua sasaran yang telah di rencanakan mendapatkan dan menerima sosialisasi dari tim teknis. Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan dilapangan yaitu beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui tentang Sosialisasi Program Rusunawa yang telah dilakukan. Bahkan syarat-syarat untuk menghuni rusunawa dan fasilitas yang ada disana saja mereka masih belum mengetahuinya. Hal ini mengakibatkan rusunawa sepi penghuni tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Padahal pengetahuan komunikan atau kelompok sasaran tentang adanya kebijakan ini sangat penting dan menjadi alat ukur apakah sosialisasi sudah dilakukan dengan optimal atau sosialisasi hanya

dilakukan seadanya dan tidak lagi memperhatikan tujuan sebenarnya.

5. *With What Effect* (Pengaruh)

Selain komunikasi, *feedback* merupakan salah satu unsur dalam proses komunikasi. *Feedback* yang dimaksud adalah efek atau umpan balik yakni tanggapan komunikasi apabila tersampaikan oleh komunikator. Dengan kata lain, terjadi perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku publik sesuai dengan yang diharapkan komunikator atau pelaksana sosialisasi di awal perencanaan. Efek sosialisasi merupakan hal yang muncul setelah dilakukan sosialisasi Program Rusunawa dilakukan oleh tim teknis.

Dari hasil penelitian bahwa ada dampak atau pengaruh yang muncul setelah sasaran yang mengetahui tentang sosialisasi program rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena salah satu tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memotivasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan kawasan pemukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang. Sehingga program dan tujuan pemerintah yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.

Efek yang datang dari sasaran yang belum mendapatkan sosialisasi tentu belum bisa didapatkan. Karena tidak akan ada *feedback* atau efek apabila pesan tidak tersampaikan kepada yang dituju. Akan tetapi masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya mengakui dan berpikiran bahwa setiap program yang telah dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan yang baik untuk kebaikan dan kemajuan Kota Pekanbaru kedepannya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi Program Rusunawa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pekanbaru

Pengaruh suatu gangguan berkomunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk lingkungan dimana komunikasi itu terjadi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif dan tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan komunikator dan penerima.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi Program Rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pekanbaru adalah:

1. Dana / Biaya

Faktor dana/biaya dalam melakukan sosialisasi berperan sangat penting dalam kelancaran proses sosialisasi agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Tanpa adanya ketersediaan dana yang memadai, penganggaran yang tepat sasaran, maka pelaksanaan dari sebuah program kebijakan ini tidak dapat dilakukan.

Dana/biaya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan pelaksanaan proses sosialisasi. Biaya yang digunakan ini adalah untuk operasional sosialisasi seperti membuat spanduk, brosur-brosur, menyampaikan informasi melalui media televisi, surat kabar, majalah, radio, dan kegiatan sosialisasi.

2. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan

sosialisasi program rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fasilitas tidak saja dapat memainkan peranan penting dalam kegiatan sosialisasi tetapi juga kegiatan lainnya yang turut menunjang pelaksanaan sosialisasi, kualitas fasilitas yang baik dan layak maka akan memudahkan akses dan kegiatan sosialisasi.

Kurangnya fasilitas untuk kegiatan proses sosialisasi seperti kendaraan operasional lapangan sangat mempengaruhi sehingga mereka mempunyai keterbatasan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini secara menyeluruh di wilayah Kota Pekanbaru dan menyebabkan kegiatan sosialisasi tidak berjalan dengan efektif. Selain itu fasilitas penunjang di rusunawa sendiri juga sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk menghuni rusunawa tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembangunan sebuah program baru yang dibangun dari awal tidaklah mudah. Masih banyak kendala yang berdatangan, salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi karena partisipasi merupakan faktor dominan yang akan menentukan hidup matinya suatu organisasi, oleh karena itu suatu organisasi atau program tidak dapat terlepas dari partisipasi, meskipun bukan satu-satunya faktor tetapi membawa pengaruh yang signifikan dalam organisasi.

Keikutsertaan dan kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat sendirilah yang bisa langsung menilai bagaimana program rusunawa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa keterlibatan langsung dalam penghunian rusunawa.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah ada untuk membantu masyarakat. Kurangnya kepedulian masyarakat akan tempat tinggal yang layak memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan sosialisasi dan membuat tujuan dari sosialisasi tersebut tidak teralisasi dengan baik. Program rusunawa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat yang sadar akan keadaan dirinya, tentu akan mempergunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

KESIMPULAN

Komunikator menganggap sosialisasi ini sudah cukup dilakukan 3 kali dalam setahun, padahal jika dibandingkan dengan luas dan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka sosialisasi tidak cukup. Pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan belum menyeluruh, hanya bagian tertentu saja yaitu mengenai syarat dan prosedur, besaran tarif sewa, serta fasilitas yang ada. Media yang digunakan dalam sosialisasi terlalu sedikit untuk menjangkau masyarakat lainnya yang berada di Kota Pekanbaru. Sasaran yang dituju dalam sosialisasi memang sudah tepat namun belum

menyeluruh, hanya beberapa masyarakat yang mendapatkan sosialisasi yaitu masyarakat disekitar rusunawa. Tidak berjalannya kegiatan sosialisasi ini dapat pula dilihat dari pengaruh yang muncul setelah sosialisasi dilakukan tidak terlalu dapat dirasakan oleh sasaran dalam sosialisasi.

Dalam hal ini dana/biaya memang sangat mempengaruhi keberhasilan proses sosialisasi program rusunawa di Kota Pekanbaru. tanpa adanya ketersediaan dana yang memadai, penganggaran yang tepat sasaran, maka pelaksanaan dari sebuah program kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari sosialisasi program rusunawa. Kualitas yang baik dan layak akan memudahkan akses kegiatan sosialisasi tersebut sehingga sosialisasi akan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi keberhasilan sosialisasi. Kurangnya kepedulian masyarakat akan tempat tinggal yang layak memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan sosialisasi dan membuat tujuan dari sosialisasi tersebut tidak teralisasi dengan baik.

SARAN

Seharusnya sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan walaupun membutuhkan waktu yang banyak. Untuk merubah pola pikir dan tingkah laku seseorang tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian jika sosialisasi lebih sering dilakukan maka akan meningkatkan pemahaman sasaran kebijakan sehingga tingkat penolakan akan berkurang. Pesan yang disampaikan harus menyeluruh kepada komunikan, kemudian media yang digunakan harus diperbanyak agar dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru seperti surat kabar, baliho televisi, internet, dan sebagainya karena

komunikasikan dalam sosialisasi tidak harus memiliki semua media untuk mendapatkan informasi mengenai program pembangunan. Sasaran ataupun komunikasi sudah tepat tetapi belum menyeluruh, untuk itu UPTD Rusunawa harus lebih giat melakukan sosialisasi agar seluruh sasaran dapat menerima pesan ataupun informasi yang diberikan secara menyeluruh. Kemudian komunikator harus bisa mengetahui pengaruh yang muncul setelah sosialisasi dilakukan kepada komunikan. Sehingga jikalau pengaruh yang muncul adalah tidak baik untuk sasaran, maka perlu dilakukannya perbaikan atau evaluasi demi kebaikan bersama.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, seharusnya instansi terkait seperti UPTD Rusunawa harus menyediakan dana/biaya lebih serta dukungan yang lebih kepada proses sosialisasi program pembangunan ini agar saat pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Selain itu fasilitas yang disediakan juga harus diperhatikan seperti kendaraan operasional agar sosialisasi bisa dilakukan dengan menyeluruh. Kemudian dengan partisipasi dan peran serta masyarakat disini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dewi, Sutisna. 2007. *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi & Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- _____ 2005. *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gunawan, Ary H. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Nawawi, Ismai. 2009. *Public Policy: Analisi, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Nurdin, M. Amin & Ahmad Abroriri, 2006. *Mengerti Sosiologi*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Palikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sopiah, 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno, Edi. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, & Praktik*. Pekanbaru: Alaf Press
- Sulistyawati, Indah. 2010. *Ensiklopedi Sosiologi, Pengetahuan Umum Sosiologi*. Bogor: CV. Kaldera
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementsi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Sutaryo, 2005. *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju

Jurnal

Noveria, Mita.. Fenomena Urbanisasi & Kebijakan Penyediaan Perumahan dan Permukiman di Perkotaan Indonesia. Edisi XXXVI/No.2/2010

Dokumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru